

PERAN KEKUASAAN ABSOLUT DALAM BIROKRASI APARAT KEPOLISIAN: Analisis Studi Kasus Tindak Kriminal Irjen Ferdy Sambo

Titik Wardiyah Amini^{1)*}, Ahmad Fauzi²⁾

^{1,2)}Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

*Corresponding e-mail: titikwardiyahamini@gmail.com

ABSTRAK

Perintah Ferdy Sambo yang melanggar hukum namun masih ditaati oleh ajudannya, menandakan terdapat peran kekuasaan yang absolut dalam birokrasi aparat kepolisian. Max Weber menyebutnya dengan otoritas legal rasional, dimana seorang pejabat dihormati dan ditaati karena peran kekuasaannya dalam birokrasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis teori otoritas Max Weber dalam Otoritas kepemimpinan Ferdy Sambo mantan Kadiv Propam Polri. Otoritas apa saja yang dimiliki oleh Ferdy Sambo sehingga perintah yang melanggar kode etik dipatuhi oleh ajudannya serta anggota propam polri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati segala bentuk perkembangan berita Ferdy Sambo yang ada di media massa baik pada web, televisi, youtube, berita koran, atau sumber berita media massa yang lain seperti Instagram. Hasil penelitian yang diperoleh Ferdy sambo memiliki otoritas legal rasional dan otoritas tradisional, namun Ferdy Sambo tidak memiliki otoritas kharismatik. Pengaruh otoritas legal rasional yang berasal dari jabatannya sebagai kadiv propam di Polri dan otoritas tradisional yang ia dapatkan dari keluarga besarnya. Sehingga hal ini membuat Ferdy Sambo cukup disegani oleh internal polri. Ferdy Sambo menyalahgunakan jabatannya untuk melancarkan tindakan kriminalnya.

Kata Kunci: *otoritas, max weber, kriminal ferdy sambo*

ABSTRACT

Ferdy Sambo's order, which violated the law, but he was still obeyed by his adjutant. It indicates that there is an absolute power role in the police bureaucracy. Max Weber calls it rational legal authority, where an official is respected and obeyed because of his power role in the bureaucracy. The purpose of this research is to examine and analyze Max Weber's theory of authority in the leadership Authority of Ferdy Sambo, the former Head of the Propam Polri Division. What authority does Ferdy Sambo have so that violate the code of ethics are obeyed by his adjutants and members of the Indonesian National Police's military operations. The approach used in this research is a qualitative approach with a case study type. The data collection technique is carried out by observing all forms of Ferdy Sambo's news developments in the mass media whether on the web, television, YouTube, newspaper news, or other mass media news sources such as Instagram. The research results obtain Ferdy Sambo's rational legal authority and traditional authority, but it is Ferdy Sambo's charismatic authority. The influence of rational legal authority comes from his position as Kadiv Propam in Polri while the traditional authority comes from his extended family so this made Ferdy Sambo quite respected by the internal police. Ferdy Sambo abuse his position to carry out his criminal activities.

Keyword: *authority, max weber, criminal ferdy sambo*

PENDAHULUAN

Kriminalitas menurut kamus KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan tindakan kejahatan yang melanggar hukum dan dapat dihukum menurut undang-undang pidana. Tindak kejahatan yang dilakukan seseorang dapat merugikan, mengancam dan menghilangkan keselamatan jiwa seseorang. Tindakan kejahatan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut. Pada saat sekarang ini tindak kejahatan seperti sesuatu hal yang biasa terjadi dimasyarakat, baik dimulai dari masyarakat kecil, masyarakat menengah, sampai pada aparat kepolisian yang notabene dalam hal ini seharusnya menjadi pelindung di masyarakat (Putra dkk., 2021).

Faktor-Faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan kejahatan, diantaranya adalah faktor ekonomi, sosial, politik sampai pada faktor kekuasaan (Putra dkk., 2021). Seperti yang ramai dibicarakan oleh publik yang baru terjadi di tanggal 8 juli 2022 yaitu kasus Polisi tembak Polisi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh aparat kepolisian negara republik Indonesia (Polri) Kadiv Propam Inspektur Jenderal Ferdy Sambo (Irjen Sambo) di Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022 yang mengakibatkan terbunuhnya Brigadir Nofriansyah Hutabarat (Brigadir Yosua) mengundang perhatian publik sekaligus memberikan citra buruk kepada aparat kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa meninggalnya Brigadir Yosua yang diungkap oleh Polri pada tanggal 11 Juli 2022 menuai banyak pertanyaan dari masyarakat. Hal itu dikarenakan adanya kejanggalan dalam kasus terbunuhnya brigadir J. Presiden Joko Widodo meminta kepada Polri agar insiden tindak kriminal yang dilakukan oleh polisi tersebut harus diusut secara tuntas dan transparan. Karena tanpa pengusutan secara tuntas dan transparan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri (CNN Indonesia, 2022).

Kasus yang menyandung seorang perwira tinggi yaitu Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo selanjutnya disebut FS mengundang perhatian publik bahwa birokrasi Polri tidak sedang baik-baik saja. Dilansir dari berita televisi dan media sosial CNN Indonesia, FS dalam kasusnya menyeret tiga kasus sekaligus, *Pertama* Penipuan Kasus, *Kedua* *Obstruction of justice*, *Ketiga* Menghilangkan

barang bukti. *Pertama*, kasus penipuan yaitu diawali dengan laporan pertama yang dilakukan oleh FS kepada aparat kepolisian tentang adanya tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua kepada istrinya yaitu Putri Candrawati (PC), namun setelah adanya pemeriksaan lebih lanjut, Hakim menyatakan bahwa laporan FS tersebut tidak terbukti. *Kedua*, *Obstruction of justice* setelah dilakukan penyidikan oleh direktorat tindak pidana siber polri menetapkan 7 tersangka *Obstruction of justice* atas kasus pembunuhan brigadir Nofriyansah hutabarat (brigadier J). Tersangka utama yang diumumkan pada hari kamis, 1 September 2022 adalah FS dan enam tersangka lainnya merupakan orang dekat FS yaitu anggota kadiv propam polri. *Ketiga*, perintah pengamanan barang bukti, Hendra Kurniawan merupakan bawahan langsung dari FS, Hendra diperintahkan FS untuk mengamankan saksi-saksi, seperti Bripka Ricky Rizal, Bharada E dan Kuat Ma'ruf, hingga pengamanan CCTV dirumah FS (Nasional Tempo.co, 2022).

Perintah Ferdy Sambo yang melanggar hukum namun masih ditaati oleh ajudannya, menandakan terdapat peran kekuasaan yang absolut dalam birokrasi aparat kepolisian. Max Weber menyebutnya dengan Otoritas Legal Rasional. Dimana seorang pejabat dihormati dan ditaati karena peran kekuasaannya dalam birokrasi tersebut. Max weber mengatakan bahwa otoritas yang mendapatkan legitimasi *rasional* adalah bersandar pada kepercayaan terhadap peraturan tertulis dan kepercayaan kepada mereka yang memiliki legalitas untuk mengeluarkan perintah (Douglas J.Goodman, 2009). Namun dalam hal ini polisi yang tentu memiliki kode etik dan paham terhadap kode etiknya tetap mematuhi ferdy sambo yang melanggar hukum. Lantas otoritas apa saja yang dimiliki oleh ferdy sambo sehingga mampu menekan ajudannya untuk melakukan tindak kriminal tersebut?

Max weber membagi otoritas menjadi tiga, yaitu otoritas legal rasional, otoritas tradisional dan otoritas kharismatik (Douglas J.Goodman, 2009). Otoritas tradisional yaitu otoritas yang bersal dari tradisi atau adat istiadat. Sedangkan otoritas kharismatik didasarkan pada kemampuan tidak biasa (khusus) yang ada pada diri seseorang, kemampuan tersebut diyakini sebagai kemampuan yang diberikan oleh tuhan kepada pemimpin tersebut, kemampuan tersebut biasa

disebut di dalam Islam dengan istilah karomah. Otoritas legal rasional disebut juga dengan kewenangan hukum yang berlaku dimasyarakat.

Otoritas tradisional digambarkan oleh penelitian Mustafa Mansur dalam penelitiannya yang berjudul otoritas dan legitimasi kedudukan pemimpin tradisional di Loloda Maluku Utara. Menunjukkan bahwa akibat adanya perubahan status kerajaan Loloda menjadi pemerintahan Hindia Belanda kedudukan pemimpin tradisional di Loloda mengalami degradasi. Namun pemimpin masyarakat Loloda tetap memakai gelar raja (Kolano) karena dilaterbelakangi oleh otoritas dan legitimasi tradisional, kharismatik serta sistem pewarisan kekuasaan dalam status sosialnya. Dalam konteks ini, pemerintah colonial belanda juga mengakui gelar raja Loloda Maluku Utara sebagai strategi membangun kekuasaannya di Loloda. Pada masa kemerdekaan Indonesia, kedudukan pemimpin tradisional disimbolkan dengan *mengkubumi*, namun masyarakat loloda menganggapnya sebagai raja tradisional, kharismatik, dan sistem pewarisan (Mansur & Sofianto, 2013).

Penelitian Ibnu Shofi menjelaskan bahwa otoritas tradisional dan kharismatik juga dimiliki oleh seorang kiai, penelitiannya yang berjudul analisis teori otoritas maxweber dalam bentuk kepemimpinan multikultural kiai sholeh bahrudin ngalah menunjukkan kiai sholeh memiliki otoritas tradisional dan kharismatik, pengakuan kharismatik itu disematkan kepada kiai dari jama'ahnya dimana beliau memiliki akhlak yang luar biasa indah serta keluwesannya dalam menghadapi masalah dimasyarakat dan sebagai contoh yang baik Uswatun khasanah beliau juga seorang pemimpin tunggal dari sebuah pondok pesantren, namun kepemimpinan kiai sholeh tidak termasuk kedalam otoritas legal rasional (Shofi, 2021).

Otoritas legal rasional, kharismatik dan tradisional juga ditemukan pada Tuan Guru masyarakat Lombok (Sulhan & Lessy, 2022). Hasil penelitian M.Sulhan dalam penelitiannya menyatakan bahwa otoritas Tuan Guru terhadap Dakwah Islam pada masyarakat Sasak di Lombok memiliki tiga otoritas sekaligus yaitu otoritas tradisional yang didapat dari aspek adat istiadat yang bersal dari garis keturunan, kedua otoritas kharismatik yakni otoritas yang didasarkan atas *karamah*, ketaatan, keikhlasan, keistiqomahan dan keteguhan dalam beramal dan

berpegang teguh pada *Ahlussunah wal jamaah*, ketiga otoritas legal rasional yang didasarkan atas legitimasi dari sistem sosial, instansi Pendidikan formal dan pendidikan pesantren. Otoritas Tuan Guru mampu memengaruhi tingkat penerimaan dan respon masyarakat terhadap dakwah Islam yang mengalami peningkatan baik pada antusias masyarakat dalam belajar agama maupun bertambah pesatnya lembaga pendidikan pesantren.

Berdasarkan penelitian di atas, persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama mengkaji otoritas Max Weber dan perbedaan dalam penelitian ini adalah tema penelitian yang dikaji. Penelitian ini menjelaskan tentang otoritas di dalam birokrasi Polri yang dimiliki oleh Ferdy Sambo sehingga mampu memerintahkan ajudannya untuk melakukan tindak kriminal. Penelitian ini akan menjelaskan hubungan otoritas kekuasaan Irjen Ferdy Sambo terhadap perintah tindakan kriminal terhadap ajudannya. Tidak banyak peneliti yang mengungkap otoritas birokrasi aparat negara, sehingga penelitian ini bertujuan untuk memaparkan otoritas birokrasi Polri yang mempengaruhi tindak kriminal anggotanya.

KAJIAN PUSTAKA

Otoritas Tradisional Max Weber

Otoritas tradisional yaitu otoritas yang bersal dari tradisi atau adat istiadat. Pemimpin otoritas tradisional bukan karena bakatnya namun kepada faktor keturunan, misal seorang anak kyai anak raja yang akan mewarisi tahta ayahnya. Otoritas tradisional berdasarkan pada hubungan yang bersifat personal atau pribadi dan penerus tahta dari pemimpin terdahulu (Ritzer, 2011). Dalam otoritas tradisional, pemegang kekuasaan adalah seseorang yang dianggap mampu dan mengetahui adat istiadat tradisi yang berlaku, mengetahui hal-hal yang dianggap suci dalam tradisi tersebut. Dalam komunitas pedesaan, otoritas dipegang oleh mereka yang sudah tua yang dianggap paling mengetahui kearifan tradisional dan memenuhi syarat kewibawaan sebagai ketua suku tradisi (Giddens & Kramadibrata, 1986).

Weber membedakan tipe otoritas tradisional kedalam tiga bagian yaitu *patriarkhalisme*, *gerontokrasi* dan *patrimonialisme*. *Gerontokrasi* yaitu otoritas yang dipegang oleh orang yang tua dalam suatu kelompok. *Patriarkhalisme* yaitu

sebuah otoritas dipegang oleh seseorang yang mewarisi dari kepemimpinan sebelumnya, otoritas ini berpegang pada sistem keturunan dan kekerabatan yang berhak mewarisi tahta dalam keluarga. Sedangkan *Patrimonialisme* adalah otoritas ini berakar pada sistem administrasi rumah tangga sang penguasa, ini ditandai dengan bercampurnya kehidupan pribadi dan fungsi-fungsi pemerintahan. Pejabatnya diambil dari para pelayan dan pendamping sang penguasa (Johnson, 1990).

Otoritas Kharismatik Max Weber

Otoritas kharismatik didasarkan pada kemampuan khusus yang dimiliki seseorang, kemampuan tersebut diyakini sebagai kemampuan yang diberikan oleh tuhan kepada pemimpin tersebut, kemampuan tersebut biasa disebut di dalam islam dengan istilah karomah (Douglas J.Goodman, 2009). Orang-orang disekitarnya meyakini bahwa kemampuan yang dimiliki oleh pemimpinnya merupakan kekuatan diluar rata-rata manusia biasa, seperti nabi, rosul dan tokoh-tokoh penguasa sebelumnya.

Weber mengatakan bahwa istilah “kharisma” menjadi sebuah identitas atau bakat seseorang yang dianggap berbeda dari orang - orang pada umumnya. Ia dianggap mempunyai kekuatan unggul yang *adikodrati adimanusiawi* yang berarti memiliki kelebihan diatas rata-rata manusia biasa. Para pengikut dari tipe karisma adalah mereka merasa terpanggil untuk mengabdikan diri. Weber mengatakan pula bahwa kharisma merupakan sesuatu fenomena yang tidak rasional. Hal ini dikarenakan otoritas didasarkan pada keotentikan dari yang dianggap sebagai sang pemimpin (Giddens & Kramadibrata, 1986).

Karisma yang di unggul biasanya karena menunjukkan keaslinya dengan menampilkan karomah atau memberikan wawasan supranatural. Para pengikut akan mengakui legitimasi kekuatan atas otoritas kharismatik dengan bertindak mengikuti sang pemimpin. Pada otoritas ini tidak ada herarki yang jelas dan penghasilan diperoleh dari berbagai hadiah maupun hasil rampasan dan tidak diatur dalam hukum tertentu (Hasanah & Kosim, 2021).

Para pengikut yang mendefinisikan pemimpin mereka sebagai orang yang berkarisma, maka pemimpin itu disebut pemimpin karismatik dan terlepas dari benar atau tidaknya pemimpin tersebut memiliki kelebihan yang menonjol. Di

luar dari tipe ideal birokrasi, staf dari pemimpin karismatik tidak memiliki idealnya staf birokrasi. Anggota staf kharismatik secara teknis tidak ada keahlian yang terlatih, mereka dipilih karena mereka memiliki kualitas yang sedikit sama dengan pemimpinnya yang kharismatik. Selain itu Jabatan didalam otoritas kharismatik tidak memiliki hierarki yang jelas. Kerja mereka tidak membentuk karir dan tidak ada peraturan pemberentian atau pengangkatan staf secara jelas. Staf yang tidak dapat mengatasi situasi yang ada maka pemimpin kharismatik bebas campur tangan (Douglas J.Goodman, 2009).

Organisasi dalam kepemimpinan kharismatik tidak memiliki aturan formal, tidak ada administrative dan tidak ada presenden yang mengarahkan pada penilaian baru. Weber mennganggap staf pemimpin kharismatik sebagai staf yang *inferior* dalam bentuk organisasi birokrasi. Kepemimpinan kharismatik sangat rentan dalam hal penerus kepemimpinan hal ini dikarenakan sistem kharismatik akan bertahan hanya selama pemimpin kharismatik hidup, ketika pemimpinnya mati maka barulah staf otoritas kharismatik memiliki peran didalamnya untuk menjaga organisasinya agar tidak punah (Douglas J.Goodman, 2009).

Otoritas Legal-Rasional MaxWeber

Otoritas legal rasional disebut juga dengan kewenangan hukum yang berlaku dimasyarakat. Landasan dari otoritas rasional adalah legitimasi seorang yang berkuasa. Otoritas yang dilegitimasi berdasarkan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh sang penguasa dan disepakati bersama (Douglas J.Goodman, 2009). Aturan tertulis tersebut hanya terjadi pada sistem birokrasi. Terdapat beberapa tipe birokrasi Max Weber yaitu, *Pertama* badan atau Lembaga birokrasi memiliki aturasn resmi. *Kedua*, setiap lembaga memiliki arena kompetensi spesifik. Lembaga atau organisasi tersebut memiliki serangkaian kewajiban untuk melaksanakan berbagai fungsi otoritas, dan cara-cara pemaksaan yang diperlukan bagi dilakukannya pekerjaan tersebut. *Ketiga* jabatan diorganisasikan kedalam suatu sistem hierarkis. Weber menekankan bahwasanya sekali seorang individu masuk kedalam birokrasi maka dia akan terlibat didalamnya. Mengikuti roda pergerakan dan akan sulit untuk keluar dari sistem tersebut.

Kewenangan otoritas legal rasional disebut juga dengan kewenangan hukum karena didasarkan pada kerangka hukum yang berlaku dan dipatuhi di masyarakat.

Landasan dari otoritas legal rasional adalah legitimasi atau hak orang yang berkuasa. Legitimasi sang pemimpin atau pemegang kekuasaan untuk mengeluarkan perintah berdasarkan aturan yang disepakati bersama dan menerapkannya sesuai dengan konstitusi yang ditetapkan secara resmi. Perintah diberikan secara impersonal (bukan personal). Oleh karena itu dalam hal ini seorang pemimpin yang bertugas mengeluarkan perintah melakukannya sebagai institusi personal dibanding hak prerogatif pribadi. Orang-orang menciptakan lembaga ini atas dasar hukum untuk mengatur kehidupan bersama (Rachmadhani, 2021).

Weber menyatakan bahwa tidak ada mesin di dunia bagian manapun yang cara kerjanya seperti aparat dalam birokrasi. Setiap pekerja didalam birokrasi hanya sekedar *skrup* yang menjalankan mesin birokrasi. Para pekerja didalam birokrasi hanya berlomba-lomba berada pada posisi paling atas dan membesarkan diri (Douglas J. Goodman, 2009).

Tindak Kriminal

Weber mengatakan bahwasanya tindakan adalah suatu interaksi sosial dan tindakan merupakan tingkah laku yang memiliki tujuan. Menurut Weber, tindakan sosial adalah tindakan yang dapat mempengaruhi orang lain. Weber membagi tipe tindakan sosial dalam empat bagian. *Pertama* tindakan *rasional instrumental* ialah tindakan yang ditujukan untuk meraih tujuan tertentu. *Kedua* tindakan rasional nilai yaitu tindakan yang dilakukan karena kepercayaan terhadap sebuah nilai norma agama atau nilai lain yang mengandung estetika. *Ketiga* tindakan emosional yaitu tindakan individu yang akan dipengaruhi oleh perasaan dan emosi. *Keempat* tindakan tradisional ialah dimana seseorang akan mengikuti amalan seseorang dikarenakan sebuah tradisi kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut (Douglas J. Goodman, 2009).

Kriminalitas diartikan juga sebagai tindakan yang melanggar hukum dan norma-norma sosial yang berlaku didalam Negara dan masyarakat (Putra dkk., 2021). Tindakan kriminal dapat dipengaruhi dari dua arah yaitu, faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ekonomi yang mendesak, kurangnya lapangan pekerjaan dan faktor kesejahteraan hidup yang lain. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor pendidikan, pergaulan dan kondisi lingkungan sekitar

(Putra dkk., 2021). Tindak kriminal atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat atau pemangku kekuasaan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tindakan atas dasar ekonomi dan bukan ekonomi. Tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat atas dasar ekonomi yaitu tindakan yang merugikan keuangan negara serta memperkaya diri sendiri seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan tindakan pidana bukan atas dasar ekonomi yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan perbuatan sewenang wenang (Arief & Arief, 2007). Penyalahgunaan wewenang dalam kekuasaan kerap kali juga dilakukan oleh polisi yang notabene bertindak sebagai penegak hukum. Tanggung jawab seorang polisi sebagai penegak hukum seringkali disalahgunakan seperti melakukan tindakan kriminal itu sendiri. Oleh karena itu dalam hal ini dapat diartikan bahwa tindak kriminal yang dilakukan oleh Ferdy sambo adalah tindakan kriminal *rasional instrumental* dan *emosional* yang bertujuan untuk meraih tujuan tertentu dan sebagai pelampiasan atas emosionalnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penyajian data secara obyektif. Penelitian kualitatif adalah penelitian mendalam dan terpusat karena berdasarkan fakta, peristiwa dan realita. Metode ini peneliti gunakan agar dapat menjelaskan objek kajian secara menyeluruh, yaitu dengan menganalisis setiap perkembangan berita yang dikeluarkan baik dari televisi, website social media dan lain-lain (Saldaña, 2016). Penelitian ini menggunakan Teori Max Weber dengan tujuan untuk menggambarkan tentang bagaimana peran kekuasaan absolut dalam birokrasi aparat kepolisian mempengaruhi tindak kriminal irjen ferdy sambo.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati segala bentuk perkembangan berita Ferdy Sambo yang ada di media massa baik pada web, televisi, youtube, berita koran, atau sumber berita media massa yang lain seperti instagram. Selain itu, peneliti juga menggunakan kajian kepustakaan (*literature review*) dengan menganalisis referensi seperti jurnal ilmiah dan buku yang berkaitan dengan pembahasan. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Tahap reduksi atau

pengambilan data inti kemudian dilakukan kategorisasi sesuai pada tema yang sedang diteliti. Penyajian data di komperasikan dengan teori weber dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi ferdy sambo

Ferdy Sambo lahir pada tanggal 19 februari 1973 adalah seorang mantan perwira tinggi polri. Jabatan terakhirnya adalah sebagai Yanma Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi. Ferdy sambo merupakan lulusan akademik Kepolisian tahun 1994 (Alfathan, 2022). Pada tahun 2010 Ferdy Sambo menduduki jabatan sebagai kepala satuan reserse kriminal (kasat reskrim) Polres Jakarta Barat. Berlanjut pada 2012 sambo menjabat sebagai Kapolres Purbalingga. Setahun kemudian ia menjabat sebagai kapolres brebes. Setelah itu pada tahun 2015 Ferdy Sambo dimutasi menjadi Wadirreskrim polda metro jaya pada 2015 (Liputan6.com, 2022b).

Karirnya yang bagus, tidak membutuhkan waktu lama baginya untuk dipercaya menjabat posisi yang lebih tinggi yaitu sebagai Kasubdit IV Dittipidum Bareskrim Polri tahun 2016. Ferdy Sambo kemudian di percaya menjabat Dittipidum Bareskrim Polri pada 8 November 2019. Setahun kemudian kapolri jenderal Pol Idham Azis mempromosikan Brigjen Pol Ferdy Sambo sebagai Kadiv Propam Polri (Liputan6.com, 2022b).

Ferdy Sambo berasal dari keluarga terhormat. Semua keluarga Ferdy Sambo yaitu kakak kandungnya dan ayahnya berkecimpung di bidang Polri.(Alfathan, 2022) Ayah ferdy sambo merupakan perwira jenderal bintang dua, mayor jenderal polisi (Mayjen) Pieter Sambo. Sedangkan kakak kandung Ferdy Sambo ialah seorang jenderal polisi, pangkatnya inspektur jenderal yang kabarnya masih aktif di polri sampai sekarang. Selain itu mertua Ferdy Sambo yaitu ayah dari putri candrawati ialah seorang Brigadir jenderal TNI (Brigjen) atau jenderal bintang satu. Oleh karena itu, tak heran jika Ferdy Sambo memiliki pengaruh yang cukup besar di lingkungan polri. Sebab dia berasal dari keluarga jenderal (Alfathan, 2022).

Menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan Indonesia yaitu Mahfud MD mengatakan bahwasanya, kelompok Ferdy Sambo itu seperti kerajaan di internal polri.

“Karena ini tak bisa dipungkiri ada kelompok Sambo sendiri ini yang seperti menjadi kerajaan Polri sendiri di dalamnya. Seperti sub Mabes yang sangat berkuasa,” ujar Mahfud MD (Kompastv, 2022).

Otoritas Irjen Ferrdy Sambo

Pengaruh Otoritas Irjen Ferdy Sambo terhadap tindak kriminal yang dilakukan, diklasifikasikan sebagai berikut:

Otoritas Legal Rasional

Berdasarkan rekam jejak karirnya, sudah dapat dipastikan bahwa Ferdy Sambo memiliki otoritas legal rasional. Hal ini dapat dilihat dari biografi perjalanan karirnya dimana dia memiliki prestasi yang baik dalam karirnya sampai mengantarkan pada jabatan bintang dua sebagai Kadiv Propam Polri. Kewenangan otoritas legal rasional berdasarkan pada kerangka hukum yang tertulis. Legitimasi pemegang kekuasaan untuk mengeluarkan perintah berdasarkan aturan yang disepakati dan ditetapkan secara resmi. Seseorang dengan otoritas legal rasional menjalankan tugasnya sesuai dengan seperangkat aturan yang mengakar dalam konteks rasional yang memiliki rasionalitas nilai. Orang yang terlibat dalam otoritas legal rasional akan tunduk pada otoritas ini mematuhi perintah atasan mereka, menerima norma-norma pribadi yang menentukan otoritas tersebut. Weber mengatakan bahwa sekali seorang individu masuk kedalam birokrasi maka dia akan terlibat didalamnya. Mengikuti roda pergerakan dan akan sulit untuk keluar dari sistem tersebut (Douglas J. Goodman, 2009).

Oleh karena itu, berdasarkan rekam jejak karirnya dan jabatan yang dimilikinya Ferdy Sambo memiliki pengaruh yang besar dalam birokrasi polri. Berawal dari jumlah ajudan ferdy sambo yang melebihi ajudan kapolri. Ajudan Ferdy Sambo berjumlah delapan orang. Komisaris Jenderal (purnawirawan) Ito Sumardi menyatakan bahwa Ferdy Sambo memiliki delapan ajudan, hal ini menjadi bukti bahwa terdapat masalah didalam sumberdaya manusia di Polri (detikjateng, 2022). Ito sumardi juga menyatakan bahwa pada jamannya perwira

tinggi polri hanya memiliki dua orang ajudan, kalau FS memiliki 8 ajudan sudah pasti dia memiliki kekuasaan yang besar dalam jabatannya. Perpindahan jabatan yang terlalu cepat menyebabkan Ferdy Sambo lengah dalam kuasanya dan melakukan *abuse of power* atau penyalahgunaan wewenang.

Pengaruh otoritas Ferdy Sambo juga sampai pada kasus yang sedang mencuat saat ini, dimana pejabat dibawah FS terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau yang disebut dengan *Obstruction of justice*. Siber Polri menetapkan 7 tersangka yaitu FS sendiri, 6 diantaranya adalah anggota Kadiv Propam Polri yaitu Kompol Chuck Putranto mantan Rowabprof divisi Propam Polri. Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria mantan Biropaminal Divisi Propam Polri, hingga AKBP Arif Rahman mantan Wakadaen B divisi Propam Polri. Hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh otoritas Ferdy Sambo dalam birokrasi polri. Tugas masing-masing *obstruction of justice* ialah ada yang ditugaskan untuk menghilangkan rekaman video cctv dan barang bukti yang lain.

FS sebagai Kadiv Propam Polri dengan otoritas kekuasaannya mampu mengendalikan anggota propam polri yang notabene setiap anggota pasti memahami kode etik yang berlaku pada institusi Polri, namun kode etik tersebut diacukan oleh anggota Propam demi menaati perintah FS untuk menghilangkan barang bukti pembunuhan brigadir J. Sehingga pada akhirnya Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi para anggota Propam Polri yang terlibat dalam *Obstruction of justice* dalam pembunuhan brigadir J (Liputan6.com, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa otoritas FS cukup disegani didalam internal Polri. Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa bahwa tidak ada mesin didunia ini bagian manapun yang cara kerjanya seperti aparat dalam birokrasi. Setiap pekerja didalam birokrasi hanya sekedar *skrup* yang menjalankan mesin birokrasi. Para pekerja didalam birokrasi hanya berlomba-lomba berada pada posisi paling atas dan membesarkan diri (Douglas J.Goodman, 2009). seorang bawahan yang tunduk kepada atasan merupakan tanda patuh terhadap atasan mereka, karena mereka menerima norma-norma pribadi yang menentukan otoritas tersebut, bukan karena mereka menerima norma-norma yang mendefinisikan otoritas tersebut (Kartono, 2001).

Terdapat beberapa tipe Birokrasi Max Weber (Douglas J. Goodman, 2009). Hal itu ialah *Pertama* terdiri dari organisasi atau lembaga resmi yang terikat oleh aturan. Dapat dipahami bersama bahwa setiap birokrasi memiliki aturan, tidak terkecuali birokrasi dalam Polri. Instansi Polri memiliki kode etik yang wajib ditaati oleh semua orang yang masuk dalam keluarga Polri. Kode etik profesi bersifat mengikat bagi seluruh anggota yang tergabung dalam lembaga atau organisasi tersebut. Kode etik diciptakan dalam sebuah organisasi atau Lembaga bertujuan untuk terbentuknya berokrasi yang idealis dan professional (Perkap 14 tahun, 2011).

Kedua Setiap badan memiliki ranah kompetensi spesifik. Setiap badan memiliki pembagian kerja masing-masing berdasarkan tanggung jawabnya. Struktur birokrasi yang hirarki menjadi sumber masalah yang menyebabkan kinerja birokrasi menjadi lambat dan berbelit-belit (Saefullah, 2010). Dilansir dari berita Kompas peneliti dari *Institute for security and strategic studies (ISESS)* bidang kepolisian Bambang Rukminto mengatakan, pada dasarnya tugas ajudan Polri adalah melayani atasannya untuk urusan administrasi dan tugas-tugas protokoler, tugas rumah tangga jelas jauh dari tugas seorang ajudan (Media, 2022). Peraturan penugasan ajudan Polri diatur dalam peraturan Kapolri nomor 4 tahun 2017 tentang penugasan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada kenyataannya FS selaku kadiv propam melanggar aturan terkait dengan penugasan ajudan. Selain itu FS juga melanggar batas maksimal ajudan Polri yang seharusnya hanya memiliki 2 ajudan, namun FS memiliki 8 ajudan. FS menugaskan ajudannya keluar dari kode etik ajudan. Hal ini dapat diketahui dari siding yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta selatan pada hari selasa (8/11/2022) Putri Candrawati (PC) mengatakan bahwa Brigadir Yosua bukan ajudannya namun ajudan FS, namun brigadir yosua diperintahkan untuk menjadi supir pribadi PC. selain itu menurut PC briпка Ricky Rizal (RR) juga bukan ajudannya melainkan ajudan FS yang diperuntukan untuk menjaga anak-anak FS dan PC saat Kuat ma'ruf (asisten keluarga sambo) sedang terkena covid (Media, 2022). Berdasarkan penjelasan di atas kewenangan FS sebagai Kadiv Propam Polri justru banyak melanggar aturan. Kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya

mengakibatkan dia mudah mengatur apa saja yang dia kehendaki. Selain itu tidak adanya ketegasan dalam penerapan kode etik dikarenakan hal – hal yang sudah dianggap biasa, bahwa seorang ajudan adalah pembantu dalam hal apapun bagi seorang perwiranya.

Ketiga jabatan diorganisasikan kedalam suatu sistem hierarkis. Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, pembagian kerja sesuai kompetensi jabatan dan wewenang (Abduh & Suriani, 2022). Jabatan pada birokrasi polri memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, seperti jabatan Kadiv Propam Polri yang memiliki wewenang untuk menjalankan tugas sebagai Kadiv Propam yang berkaitan dengan pembinaan profesi dan pengamanan lingkungan di Internal Organisasi Polri. Jabatan yang di emban FS layaknya seorang ayah dalam keluarga yang membina keamanan internal keluarga. Oleh karena itu dalam hirarki jabatannya FS sangat merasa berkuasa atas kendali internal Polri dan cukup disegani oleh anggota maupun bawahannya.

Otoritas Tradisional

Garis keturunan Ferdy Sambo yang berasal dari keluarga pejabat, cukup menjadi salah satu pengaruh dalam birokrasi polri. Weber mengatakan bahwa otoritas tradisional merupakan suatu otoritas pemimpin yang didapatkan dari garis keturunan atau hubungan keluarga dengan pemimpin terdahulu, sehingga para pengikut yang dahulu sudah mematuhi pemimpinnya maka secara otomatis akan mengikuti otoritas pemimpin yang baru (Shofi, 2021).

Ayah Ferdy Sambo merupakan perwira jenderal bintang dua, mayor jenderal polisi (Mayjen) Pieter Sambo dan kakak kandung FS ialah seorang jenderal polisi. Mahfud MD menyatakan bahwa kelompok Ferdy Sambo seperti sub mabas polri yang sangat berkuasa. Oleh sebab itu tidak heran jika Ferdy Sambo cukup di segani didalam internal polri (Liputan6.com, 2022b).

Otoritas tradisonal mendapatkan legitimasinya dari tradisi adat atau keturunan. Orang menjadi pemimpin bukan karena berasal dari kemampuannya saja namun juga berasal dari faktor keturunan, seperti halnya seorang anak yang mendapatkan tahta dari ayahnya (Kartono, 2001). Weber membedakan tipe otoritas tradisional kedalam tiga bagian yaitu *gerontokrasi*, *patriarkhalisme* dan

patrimonialisme. *Gerontrokasi* yaitu otoritas yang dipegang oleh orang yang tua dalam suatu kelompok. *Patriarkhalisme* yaitu sebuah otoritas dipegang oleh seseorang yang mewarisi dari kepemimpinan sebelumnya, otoritas ini berpegang pada sistem keturunan dan kekerabatan yang berhak mewarisi tahta dalam keluarga. Sedangkan *patrimonialisme* adalah otoritas ini berakar pada sistem administrasi pribadi sang penguasa, ini ditandai dengan bercampurnya kehidupan rumah tangga sang penguasa dan fungsi fungsi pemerintahan, kemudian staf pejabat diambil dari para pendamping dan pelayan sang penguasa (Johnson, 1990).

Berdasarkan teori weber tersebut otoritas tradisional yang dimiliki oleh FS adalah *patrimonialisme* dimana ajudan-ajudan FS ikut terlibat dalam urusan rumah tangga FS. Tidak hanya menjadi pembantu dalam menyelesaikan administrasi polri namun juga membantu menyelesaikan urusan – urusan rumah tangga pribadi FS (Media, 2022).

Dilansir dari pengakuan seorang mantan polisi Aksan anggota satlinmas polres tanah Toraja Sulawesi Selatan di kanal youtube mengungkapkan bahwa:

“birokrasi polri ini perlu dibenahi karena petinggi yang berkuasa semakin bersikap sewenang pada anggotanya, petinggi polri justru mengajarkan hal yang kurang baik kepada anggotanya, selain itu saat ini apa-apa juga harus menyangkut uang kenaikan jabatan menyangkut uang , masuk polisi dengan uang, oleh karena itu mafia mafia didalam polri harus dibersihkan tuturnya” (Merdeka.Com, 2022).

Selain itu keluarga besar FS yang semuanya bergelut pada bidang kepolisian, yaitu ayah dan kakak kandung FS yang menjadi petinggi polri menambah semakin berwibawanya keluarga FS, sehingga banyak orang yang menaruh hormat padanya. *Patriarkhalisme* merupakan semacam kekuasaan *power* dipegang oleh suatu kekerabatan (rumah tangga) dan memiliki kekuasaan yang diwariskan.(Sulhan & Lessy, 2022)

Otoritas Kharismatik

Otoritas kharismatik berlandaskan pada karisma yang dimiliki oleh sang pemimpin. Mempunyai kewenangan yang istimewa yang diberikan kepada pemimpinnya. Karisma yang dimiliki oleh sang pemimpin adalah sebuah anugerah dari tuhan atau yang diyakini sebagai pembawaan seseorang sejak lahir.

Orang-orang yang meyakini kepemimpinan karismatik percaya bahwasanya kemampuan tadi merupakan sesuatu yang berada diatas kekuasaan dan manusia pada umumnya (Douglas J.Goodman, 2009). Ferdy Sambo tidak termasuk dalam otoritas karismatik karena pada kenyataannya dia dihormati bukan karena kemampuan spiritualnya namun karena jabatan dan keturunannya.

Tabel 1.1 Otoritas Ferdy Sambo

Bentuk Otoritas	Otoritas Ferdy Sambo
Legal Rasional	Jabatan dan karirnya yang melaju pesat membuat Ferdy Sambo menyalahgunakan wewenangnya.
Tradisional	Keluarga Ferdy Sambo yang berasal dari keluarga polri, mengakibatkan dirinya cukup disegani di internal polri.
Kharismatik	Tidak memiliki otoritas kharismatik.

Sumber: Hasil Penelitian tahun 2022

Weber menyatakan bahwa ketika seseorang terlibat dalam birokrasi maka dia akan terikat pada tiga hal (Douglas J.Goodman, 2009). *Pertama*, terdiri dari Lembaga atau organisasi resmi yang terikat dan menjalankan fungsinya berdasarkan aturan. *Kedua*, setiap lembaga memiliki ranah kompetensi spesifik. Lembaga atau organisasi tersebut memiliki sebuah kewajiban untuk melaksanakan berbagai fungsi otoritas, dan cara yang memaksa untuk melakukan pekerjaan tersebut. *Ketiga*, jabatan diorganisasikan kedalam suatu sistem hierarkis. Weber menekankan bahwasanya sekali seorang individu masuk kedalam birokrasi maka dia akan terlibat didalamnya. Mengikuti roda pergerakan dan akan sulit untuk keluar dari sistem tersebut (Douglas J.Goodman, 2009).

Sistem birokrasi polri yang memang sudah seperti itu dimana bawahan menjalankan perintah atasan serta tunduk dan patuh membuat Ferdy Sambo terlengah dengan kekuasaannya. Ajudan Ferdy Sambo yang merasa bahwa dia bawahan dan harus mematuhi perintah atasannya membuatnya sulit untuk mengelak, karena aturan yang memang sudah berlaku seperti itu. Dalam sidang di pengadilan Bharada Eliezer mengatakan bahwa dia takut ketika ingin menolak perintah Ferdy Sambo, hal ini dikarenakan jabatan rendah yang dimilikinya (Kompastv, 2022).

Selain itu pada otoritas tradisional Weber membagi tiga bagian yaitu gerontokrasi, patriarkhalisme dan patrimonialisme (Johnson, 1990). *Pertama*, gerontokrasi yaitu otoritas yang dipegang oleh orang yang tua dalam suatu kelompok. Oleh karena itu dalam hal ini Ferdy Sambo pemegang kekuasaan didalam rumahnya mempunyai peran besar dalam mengatur rumah tangga dan ajudannya. *Kedua*, patriarkhalisme yaitu sebuah otoritas dipegang oleh seseorang yang mewarisi dari kepemimpinan sebelumnya, otoritas ini berpegang pada sistem keturunan dan kekerabatan yang berhak mewarisi tahta dalam keluarga. Keluarga Ferdy Sambo yang berasal dari keluarga polri menjadikannya disegani dan ditaati semua perintahnya oleh sang ajudan. *Ketiga*, patrimonialisme adalah otoritas ini berakar pada sistem administrasi rumah tangga sang pemimpin, ini ditandai dengan bercampurnya kehidupan rumah tangga dan fungsi pemerintahan. Pejabatnya berasal dari para pendamping dan pelayan sang pemimpin. Ferdy Sambo mengambil delapan ajudan dalam birokrasi polri hal ini tentu bertujuan untuk mempermudah kerjanya sebagai Kadiv Propam, namun dari hal tersebut menjadikan Ferdy Sambo lengah dengan kekuasaannya.

KESIMPULAN

Ferdy Sambo memiliki legitimasi otoritas legal rasional dan tradisional. Legitimasi otoritas legal rasional ia dapatkan dari jabatan yang dimiliki di polri yaitu sebagai kadiv propam polri usia muda. Sedangkan otoritas tradisional yang berpatokan pada keturunan, menunjukkan bahwa keluarga Ferdy Sambo yang berasal dari keluarga polri menjadikan dirinya cukup disegani dalam internal polri. Dalam hal ini Ferdy Sambo tidak memiliki otoritas karismatik yang diyakini berasal dari pemberian sang maha kuasa berupa kemampuan diluar rata-rata manusia biasa. Otoritas yang dimiliki Ferdy Sambo yaitu legal rasional dan tradisional menjadi pengaruh dirinya dalam melakukan tindakan kriminal yang iya perintahkan kepada ajudannya. Dalam hal ini FS merasa bahwa semua keinginannya dapat didapatkan dari jabatan yang dia miliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, T., & Suriani, S. (2022). *Reformasi Birokrasi Polri Terhadap Pelayanan Publik Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kepolisian Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*. 4.
- Alfathan, R. (2022, Agustus 28). Silsilah Keluarga Ferdy Sambo, Ayah Eks Calon Kapolri, Mertua Jenderal TNI. *Pojoksatu.id*.
<https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/28/silsilah-keluarga-ferdy-sambo-ayah-eks-calon-kapolri-mertua-jenderal-tni/>
- Arief, B. N., & Arief, B. N. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan* (Ed. 1., cet. 1). Kencana Prenada Media Group.
- detikX, T. (t.t.). *Komjen Purnawirawan Heran Sambo Punya 8 Ajudan Padahal Biasanya 2*. detikjateng. Diambil 26 Desember 2022, dari <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6275151/komjen-purnawirawan-heran-sambo-punya-8-ajudan-padahal-biasanya-2>
- Douglas J. Goodman, G. R. (2009). *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (8 ed.). Kreasi Wacana.
- Giddens, A., & Kramadibrata, S. (1986). *Kapitalisme dan teori sosial modern: Suatu analisis terhadap karya tulis Marx, Durkheim, Max Weber*. Universitas Indonesia.
- Hasanah, R., & Kosim, M. (2021). Analisis Gaya Kepemimpinan Kharismatik Dalam Memelihara Nilai-Nilai Tradisi Kepesantrenan Tradisional Di Pondok Pesantren Nurul Huda Kamundung Sampang. *re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)*, 4(1), 72–85.
<https://doi.org/10.19105/re-jiem.v4i1.4820>
- Indonesia, C. N. N. (t.t.). *Instruksi Jokowi soal Kasus Brigadir J: Tuntaskan, Jangan Ditutupi*. nasional. Diambil 1 November 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220809113150-12-832133/instruksi-jokowi-soal-kasus-brigadir-j-tuntaskan-jangan-ditutupi>
- Johnson, P. (1990). *Teori Sosiologi klasik dan Modern* (ke-2). Gramedia Pustaka.
- Kartono, K. (2001). *Pemimpin dan kepemimpinan: Apakah pemimpin abnormal itu?* (Cet. ke-9, ed. baru (ed. ke-2)). Rajagrafindo Persada (Rajawali Pers).
- KOMPASTV (Direktur). (2022). *BREAKING NEWS - Eliezer, Ricky dan Kuat jadi Saksi Sidang Ferdy Sambo & Putri Candrawathi*.
<https://www.youtube.com/watch?v=v0MmegXOk2A>
- Liputan6.com. (2022a, Agustus 4). *Daftar Polisi yang Dimutasi Imbas Kasus Brigadir J, Ada Jenderal dan Sejumlah Perwira Menengah*. liputan6.com.
<https://www.liputan6.com/news/read/5033893/daftar-polisi-yang-dimutasi-imbasm-kasus-brigadir-j-ada-jenderal-dan-sejumlah-perwira-menengah>

- Liputan6.com. (2022b, Agustus 12). *Profil Ferdy Sambo dan Karier Moncernya di Polri*. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/5040833/profil-ferdy-sambo-dan-karier-moncernya-di-polri>
- Mahfud MD: *Ada Kerajaan Ferdy Sambo di Polri, Seperti Sub-Mabes dan Sangat Berkuasa*. (t.t.). Diambil 26 Maret 2023, dari <https://www.kompas.tv/article/320175/mahfud-md-ada-kerajaan-ferdy-sambo-di-polri-seperti-sub-mabes-dan-sangat-berkuasa>
- Mansur, M., & Sofianto, K. (2013). *Otoritas Dan Legitimasi Kedudukan Pemimpin Tradisional Di Loloda Maluku-Utara (1808-1958)*. 15(1).
- Media, K. C. (2022, November 9). *Pengamat: Tugas Ajudan Pejabat Polri Bukan Urusi Pekerjaan Rumah Tangga Atasannya*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/09/14083201/pengamat-tugas-ajudan-pejabat-polri-bukan-urusi-pekerjaan-rumah-tangga>
- MerdekaDotCom (Direktur). (2022). *Viral Polisi Curhat Dimutasi Usai Bongkar Korupsi, Minta Kapolri Berantas Sarang Mafia di Polri*. <https://www.youtube.com/watch?v=ssEKh83rg0c>
- Polri Tetapkan Bharada E Sebagai Tersangka Penembakan Brigadir J - Nasional Tempo.co. (t.t.). Diambil 1 November 2022, dari <https://nasional.tempo.co/read/1618962/polri-tetapkan-bharada-e-sebagai-tersangka-penembakan-brigadir-j>
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. diambil 29 Maret 2023, dari <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/2018/02/10>.
- Putra, A. D., Martha, G. S., Fikram, M., & Yuhan, R. J. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 3(2), 123. <https://doi.org/10.13057/ijas.v3i2.41917>
- Rachmadhani, A. (2021). *Otoritas Keagamaan Di Era Media Baru: Dakwah Gus Mus Di Media Sosial*. 5.
- Ritzer, G. (2011). *Sociological theory* (8th ed). McGraw-Hill.
- Saldaña, J. (2016). *The coding manual for qualitative researchers* (3E [Third edition]). SAGE.
- Shofi, I. (2021a). *Analisis Teori Otoritas Max Webber Dalam Kepemimpinan Multikultural Kiai Sholeh Bahruddin Ngalah*. 11.
- Sulhan, M., & Lessy, Z. (2022). *Otoritas Dan Dakwah Tuan Guru Pada Masyarakat Lombok: Studi Analisis Teori Sosial 'Otoritas' Max Weber*. 04(02).